



7.001 Penerima PKH Terlibat Judol

Dinsos DIY Putus Sementara Bantuan

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Dinas Sosial (DIY) memutuskan bantuan untuk 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka diputus setelah terindikasi terlibat dalam judi *online* (judol).

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintersih menegaskan, keputusan ini bersifat sementara. Ini sesuai kebijakan nasional dari Kementerian Sosial atas temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut," katanya Endang, kemarin (17/11/2025).

■ Baca 7.001... Hal II



Endang Patmintersih
Kepala Dinas Sosial DIY

DOK. PEMBA DIY/JOGLO JOGJA

STOP SEMENTARA

Ada sebanyak 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di DIY untuk sementara tak lagi menerima bantuan. Sebab, mereka terindikasi terlibat dalam judi *online* (judol).

Kabupaten Gunungkidul

10 orang

Kabupaten Bantul

10 orang

Kabupaten Sleman

10 orang

Kota Yogyakarta

10 orang

Kabupaten Kulon Progo

10 orang



7.001 Penerima PKH Terlibat Judol

sambungan dari hal Joglo Jogja

Ia menjelaskan, dari 7.001 penerima PKH itu, paling besar dari Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat. Selain itu, 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo.

Endang mengatakan, dinas

sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian *online*.

"Nanti ada verifikasi dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol. Karena temuan PPATK hanya

didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening," katanya.

Endang melanjutkan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi. "Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya, sudah berarti memang ini benar," kata Endang. Dia menyampaikan bahwa

dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. *Kan* sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia," katanya. **eri/and/wa**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005